



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

# KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan I  
2020

Penyusun:  
Penanggung Jawab: Haryana  
Ketua Tim: Nur Amalia | Editor: Erwin AOS | Desain Grafis: Royana Dewi  
Anggota: Santun S. | Catur Rini A | Tri Winarti | Siti Fatimah

**KANWIL DITJEN**  
**PERBENDAHARAAN**  
**Provinsi Banten**

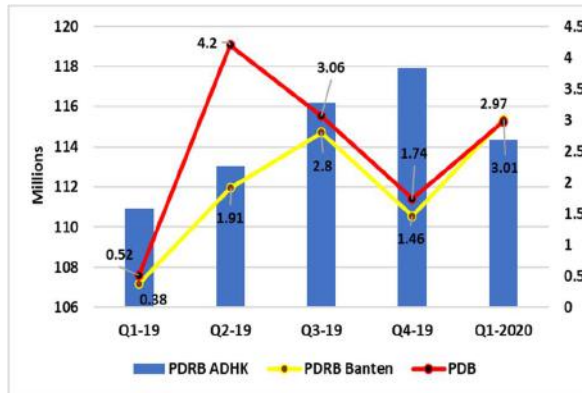
## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL .....	1
A. Produk Domestik Regional Bruto .....	1
B. Inflasi .....	2
C. Indikator Kesejahteraan .....	2
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN .....	5
A. Pendapatan Negara .....	6
1. Penerimaan Perpajakan .....	6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	8
B. Belanja Negara .....	9
1. Belanja Pemerintah Pusat .....	9
2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa .....	10
3. Pengelolaan Badan Layanan Umum .....	10
4. Manajemen Investasi Pusat .....	10
C. Prognosis Realisasi APBN .....	11
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD .....	12
A. Pendapatan Daerah .....	13
1. Pendapatan Asli Daerah .....	13
2. Pendapatan Transfer .....	16
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	17
B. Belanja Daerah .....	17
1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial .....	17
2. Belanja Daerah berdasarkan Klasifikasi Urusan .....	17
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2017 .....	18
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) .....	19
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasi .....	19
B. Pendapatan Konsolidasian .....	19
1. Analisis Perubahan Proporsi dan Perubahan Perbandingan .....	19
2. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian .....	21
C. Belanja Konsolidasian .....	21
1. Analisis Perubahan Proporsi dan Perubahan Perbandingan .....	21
2. Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional .....	22
D. Analisis Kontribusi Pemerintah dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	23
V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH .....	24
A. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Banten .....	24

**A. Produk Domestik Regional Bruto**

Perekonomian Banten triwulan I 2020 tumbuh sebesar 3,09 persen (yoy), melambat dibanding triwulan I 2019 yang tumbuh sebesar 5,45 persen (yoy). Perekonomian Banten di triwulan I-2020 dibandingkan triwulan IV-2019 mengalami kontraksi 3,01 persen. Kontraksi ini selain pola musiman di triwulan I, juga dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi sebagai respon dari adanya pandemi Covid-19 yang mulai terjadi pada Maret 2020.

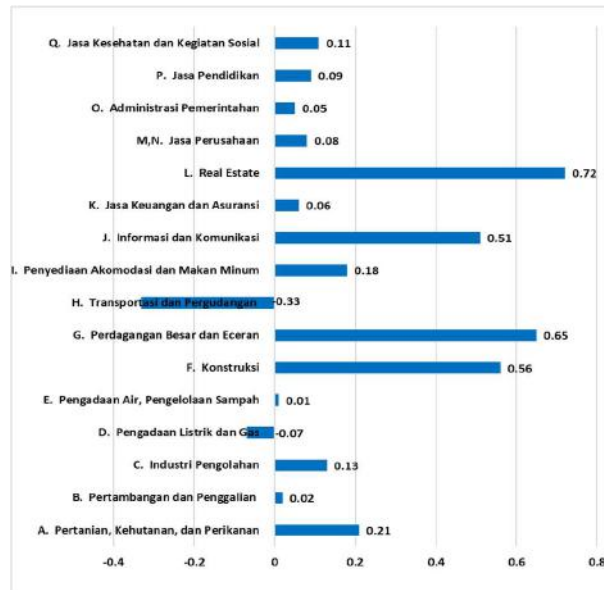
**Gambar 1.1 PDRB dan LPE PDRB, PDB Tahun 2019-2020 Triwulanan (q to q)**



Sumber: BPS Provinsi Banten dan Nasional

Dalam nominal PDRB ADHK dan ADHB triwulan I 2020 masing-masing sebesar Rp114,34 triliun dan Rp165,67 triliun. PDRB ADHB Banten berada di peringkat ke 5 dari 6 Provinsi di Jawa dengan kontribusi terhadap pulau 6,93 persen,

**Gambar 1.2 Sumber Pertumbuhan PDRB Banten Triwulan I 2020 (yoy)**



Sumber : BPS Provinsi Banten

Di lihat dari sumber pertumbuhan triwulan I 2020 (yoy) masih didominasi real estate (0,72 persen), sedangkan secara triwulanan (q to q) sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki pertumbuhan tertinggi (2,02 persen).



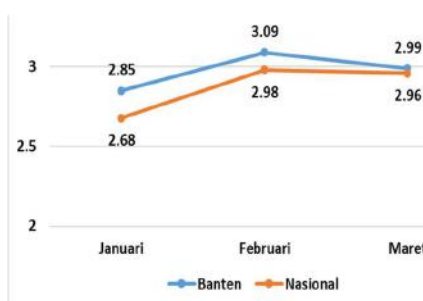
Dari sisi Permintaan pertumbuhan kontributor utama pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2020 (yoy) disumbang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 4,19 persen, sementara komponen Total Net Ekspor mengalami kontraksi hingga 5,01 persen. Dilihat dari sumber pertumbuhan, kontributor utama pertumbuhan ekonomi Banten triwulan I tahun 2020 konsumsi rumah tangga (2,40 persen) masih sebagai sumber pertumbuhan tertinggi. Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa secara q to q, ekonomi Banten mengalami kontraksi 3,01 persen. Kontraksi ini didorong oleh penurunan Konsumsi Pemerintah sebesar -45,96 persen, PMTB sebesar -5,46 persen, dan LNPRT -1,28 persen. Sementara itu konsumsi rumah tangga tumbuh melambat 0,08 persen dan komponen Total Net Ekspor tumbuh 23,47 persen.

Dampak wabah Covid-19 juga dapat dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Banten (q to q) yang hanya dari dua komponen saja, yaitu Total Net Ekspor 1,33 persen dan Konsumsi Rumah Tangga 0,05 persen. Sementara untuk komponen lainnya memberikan andil negatif pada pertumbuhan ekonomi Banten.

## B. Inflasi

Di Provinsi Banten tingkat inflasi tahun kalender Maret 2020 sebesar 0,70 persen. Sementara itu secara y on y inflasi sebesar 2,99 persen. Apabila dibandingkan dengan inflasi Nasional (2,96 persen), inflasi di Banten lebih tinggi 3 basis poin. Setiap bulannya sepanjang triwulan I 2020 bila dibandingkan dengan triwulan I 2019 (yoy) inflasi di Banten bergerak fluktuatif dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari 2020 (3,09 persen).

Gambar 1.3. Inflasi m to m Provinsi Banten dan Nasional

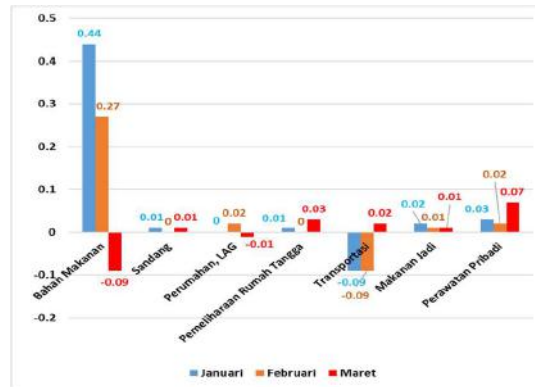


Sumber : BPS RI dan BPS Banten

Sepanjang Triwulan I 2020, terdapat beberapa kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi di atas 0,01 persen setiap bulannya. Kelompok pengeluaran tersebut, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau; transportasi; perawatan pribadi dan jasa lainnya; penyediaan makanan dan minuman/restoran; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah; serta kelompok pakaian dan alas kaki. Untuk Januari penggerak inflasi adalah kenaikan

harga cabai merah, beras dan rokok putih. Untuk bulan Februari, bawang putih menjadi pengerek inflasi utama lantaran sentimen negatif penyebaran virus corona. Pada bulan Maret, penyebab inflasi utama adalah meningkatnya harga emas perhiasan.

Gambar 1.4. Andil Inflasi m to m



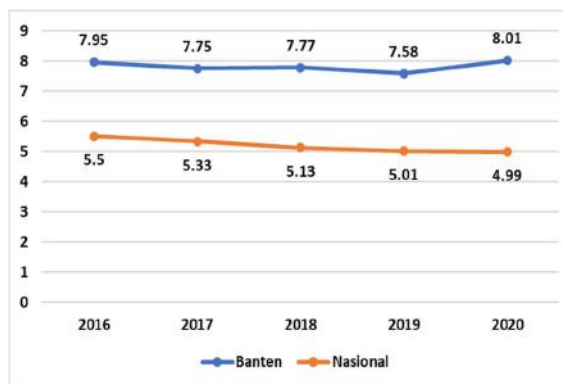
Sumber : BPS Prov Banten

C. Indikator Kesejahteraan

Bila dibandingkan antara bulan Februari 2019 dengan Februari 2020, jumlah angkatan kerja di Banten mengalami penurunan 31.197 orang menjadi 6,11 juta orang. Dalam satu tahun terakhir pengangguran bertambah 23.409 orang, hal ini sejalan dengan kenaikan TPT dari 7,58 di Februari 2019 menjadi 8,01 di Februari 2020. Angka 8,01 tersebut masih menempatkan Banten dengan angka pengangguran tertinggi secara nasional.

Banyaknya pengangguran di Banten terindikasi karena berbagai dampak baik wisata maupun industri, dimana pada bulan Februari melemah sementara kebun petani belum sanggup untuk menurunkan tingkat pengangguran. Selain itu walaupun di Indonesia wabah Covid-19 baru diumumkan di Maret 2020, Pada Januari-Februari Indonesia telah terdampak dari kasus Covid-19 di Tiongkok akibat penerapan *lockdown*. *Lockdown* ini membuat kegiatan ekspor impor terhenti karena stok bahan industri berkurang sehingga terjadi pengurangan karyawan dan pembatasan sektor pariwisata.

Gambar 1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2016-2020



Sumber : BPS Nasional dan Banten

Sepanjang tahun 2020 ini diprediksi bahwa TPT Banten akan kembali mengalami peningkatan sebagai akibat adanya Pandemi Covid-19 karena jika dilihat berdasarkan data yang ada bahwa lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor industri dan sektor perdagangan masing-





masing sebesar 24,09 persen dan 20,91 persen. Sementara dengan berlangsungnya pandemi ini dapat dikatakan bahwa sektor industri termasuk yang terkena imbas. Pada awal April 2020, sebanyak 950 industri telah merumahkan pegawainya dan bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (<https://www.merdeka.com/peristiwa/dampak-wabah-corona-950-industri-di-banten-rumahkan-karyawan.html>). Selain itu, dampak pandemi Covid 19 ini sangat besar terjadi pada usaha mikro seperti pedagang kecil sebagai imbas dari liburnya anak sekolah dan juga dirumahkannya karyawan.

Data kemiskinan yang ada adalah data per September 2019, sehingga jika dibandingkan dengan TPT September 2019, penurunan angka kemiskinan ini sejalan dengan penurunan TPT.

Pada bulan September 2019 persentase penduduk miskin di Banten sebesar 4,94 persen menurun 15 basis poin dibandingkan Maret 2019 (5,09). Selama lima tahun terakhir dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan di Banten terus mengalami penurunan, hanya terdapat satu kali peningkatan pada September 2017.

Gambar 1.6. Perkembangan Kemiskinan di Banten



Sumber : BPS Prov Banten

Terus menurunnya angka kemiskinan dan tercapainya target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam RPJMD menunjukkan bahwa perekonomian di Banten telah semakin baik. Namun untuk kondisi di tahun 2020 dengan adanya Pandemi Covid 19, diprediksikan angka kemiskinan akan kembali melonjak, sebagai akibat dari banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sehingga kehilangan pendapatannya. Dengan turunnya atau bahkan hilangnya pendapatan, otomatis kemampuan daya beli masyarakat juga ikut menurun, sehingga sulit bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.



## BAB II

### PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Realisasi pendapatan negara di Banten triwulan I tahun 2020 sebesar Rp11,15 triliun atau tumbuh 6,91 persen bila dibanding periode yang sama tahun 2019. Pendorong utama pertumbuhan pendapatan negara di Banten adalah penerimaan perpajakan yang tumbuh 7,70 persen yang berasal dari penerimaan PPN dan bea masuk yang masing-masing tumbuh 10,95 persen dan 23,91 persen. Kenaikan penerimaan bea masuk yang tinggi pertanda meningkatnya barang impor, pertumbuhan ekonomi di Banten triwulan I 2020 hanya sebesar sebesar 3,09 serta pelemahan aktivitas ekonomi akibat penyebaran Covid-19, maka diperlukan kebijakan fiskal untuk menjaga pendapatan negara tidak terlalu dalam kontraksinya.

**Tabel 2.1. Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Banten s.d Akhir Triwulan I 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)**

Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Target/ Pagu	Realisasi	Target/ Pagu	Realisasi
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>57.694,70</b>	<b>10.430,64</b>	<b>49.003,36</b>	<b>11.151,01</b>
<b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>	57.694,70	10.430,64	49.003,36	11.151,01
1. Penerimaan Perpajakan	56.100,85	9.644,56	47.273,67	10.386,98
2. PNBPN	1.593,84	786,08	1.729,70	764,03
II. HIBAH	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>26.489,19</b>	<b>5.328,19</b>	<b>24.225,63</b>	<b>5.477,66</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>9.426,85</b>	<b>1.387,02</b>	<b>11.277,46</b>	<b>1.480,31</b>
1. Belanja Pegawai	3.600,62	671,63	3.886,66	709,47
2. Belanja Barang	4.316,46	622,08	4.775,96	593,93
3. Belanja Modal	1.498,72	93,06	2.594,51	176,91
4. Belanja Bantuan Sosial	11,05	0,26	20,33	0,00
<b>II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>17.062,34</b>	<b>3.941,17</b>	<b>12.948,17</b>	<b>3.997,35</b>
1. Transfer ke Daerah	15.970,27	3.778,87	11.825,36	3.986,18
a. Dana Perimbangan	15.795,33	3.691,40	11.507,87	3.986,18
1) Dana Bagi Hasil	1.854,37	360,73	1.338,08	24,29
2) Dana Alokasi Umum	8.681,33	2.855,35	7.801,94	2.867,22
3) Dana Alokasi Khusus	5.259,63	475,33	2.367,86	1.094,67
b. Dana Insentif Daerah	174,93	87,47	317,49	0,00
2. Dana Desa	1.092,07	162,30	1.122,81	11,16
<b>C. SURPLUS DEFISIT</b>	<b>31.205,50</b>	<b>5.102,45</b>	<b>24.777,73</b>	<b>5.673,35</b>

Sumber : OMSPAN, Simtrada, DJBC & DJP (diolah)

Pada sisi belanja negara, realisasi APBN triwulan I 2020 sebesar 5,47 triliun atau 22,61 persen dari pagu, dibandingkan triwulan I 2019 naik 2,81 persen. Peningkatan pendapatan negara di Banten pada triwulan I 2020 menyebabkan terjadi surplus APBN di Banten sebesar Rp5,67 triliun. Mengingat kemungkinan kontraksinya pendapatan negara akibat pelemahan aktivitas ekonomi karena penyebaran covid-19, maka pemerintah perlu mengambil kebijakan diantaranya refocusing belanja untuk mencegah penyebaran covid-19 dan menurunkan pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2020.



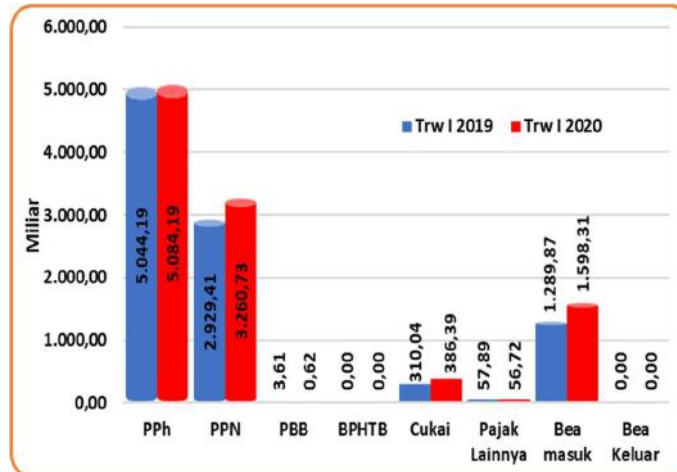
## A. Pendapatan Negara

### 1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan di Banten pada triwulan I 2020 sebesar Rp10,38 triliun, secara nominal tumbuh 7,70 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun

lalu. Secara nominal pertumbuhan terbesar terjadi pada jenis penerimaan PPN yang meningkat sebesar Rp321,77 miliar atau tumbuh 10,95 persen, disusul Penerimaan Bea Masuk yang meningkat sebesar Rp308,44 miliar. Sedangkan penurunan terjadi pada jenis pajak PBB dan Pajak lainnya.

**Grifik 2.1. Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan di Banten Triwulan I 2019 dan 2020 (Miliar Rupiah)**



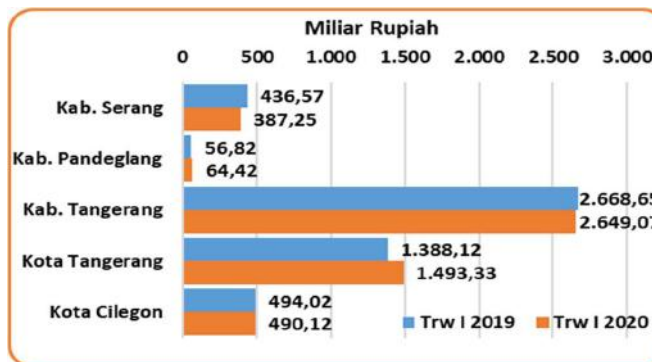
Sumber : LKPK & GFS

#### a) Pajak Penghasilan (PPh)

Realisasi penerimaan PPh triwulan I 2020 di Banten sebesar Rp5,08 triliun,

meningkat Rp40,01 miliar atau tumbuh 0,79 persen dibanding triwulan I 2019. Kontribusi terbesar PPh berasal dari jenis pajak PPh pasal 21 (42,76 persen) disusul PPh final (24,29 persen) dan PPh pasal 25/29 badan (14,68 persen).

**Grifik 2.2. Realisasi Pendapatan PPh Triwulan I 2020 berdasarkan Lokasi (Miliar Rupiah)**



Sumber : LKPK & GFS

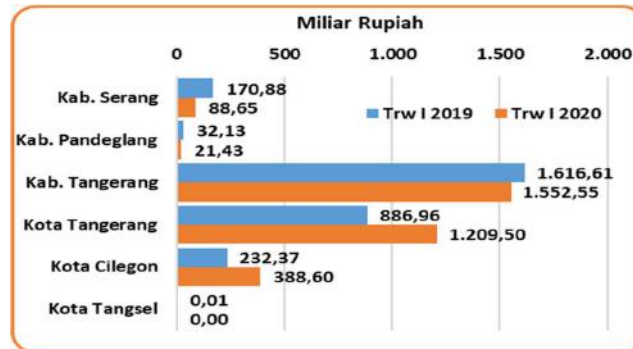
#### b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Realisasi penerimaan PPN Triwulan I 2020 di Banten sebesar Rp3,26 triliun, meningkat Rp321,78 miliar atau tumbuh 10,95 persen dibandingkan triwulan I 2019. Peningkatan penerimaan PPN ini menggambarkan kegiatan ekonomi menggeliat dan memperlihatkan adanya akselerasi pada triwulan I 2020.



Berdasarkan lokasi sebanyak 84,71 persen diperoleh dari 2 (dua) lokasi yang merupakan pusat industri penghasil barang/jasa yaitu Kabupaten Tangerang (47,61 persen) dan Kota Tangerang (37,09 persen).

**Grafik 2.3. Realisasi Pendapatan PPN Triwulan I 2020 berdasarkan Lokasi (Miliar Rupiah)**

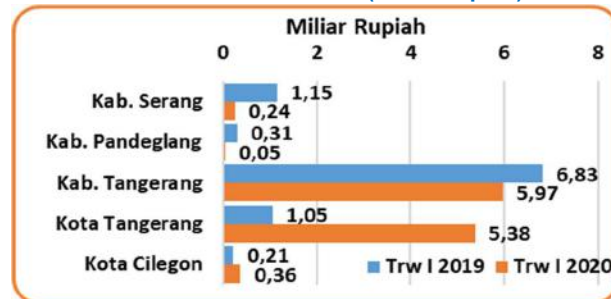


Sumber : LKPK & GFS

c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Realisasi penerimaan PPnBM triwulan I 2020 di Banten sebesar Rp12,01 miliar, tumbuh 25,73 persen atau naik Rp2,46 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan lokasi, sebanyak 49,72 persen

**Grafik 2.4. Realisasi Pendapatan PPnBM Triwulan I 2020 berdasarkan Lokasi (Miliar Rupiah)**



Sumber : LKPK & GFS

berasal dari Kabupaten Tangerang disusul Kota Tangerang (44,82 persen).

d) Penerimaan Cukai

Penerimaan cukai di Banten triwulan I 2020 sebesar Rp386,89 miliar, tumbuh 24,63 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan jenis cukai maka 89,70 persen penerimaan cukai berasal dari Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol. sedangkan berdasarkan lokasi penerimaan cukai, 99,84 persen berasal dari Kota Tangerang.

e) Penerimaan Bea Masuk

Penerimaan bea masuk cukai di Banten triwulan I 2020 sebesar Rp1,59 triliun, tumbuh 23,91 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan lokasi penerimaan, 73,80 persen berasal dari Kabupaten Tangerang, disusul Kabupaten Serang (24,79 persen).

Jakarta- "Pendapatan pajak termasuk migas Rp241,6 triliun atau 14,7 persen dari target. Kalau dibandingkan tahun lalu Rp247,7 triliun, mulai menunjukkan tren negatif 2,5 persen," kata Sri Mulyani. Meski demikian penerimaan pajak terbantu oleh membaiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh 2,5 persen pada akhir Maret 2020 dibandingkan periode sama tahun lalu. <https://banten.antarane.ws.com/berita/95164/menkeu-catat-penerimaan-pajak-hingga-akhir-maret-terkontraksi-25-persen>

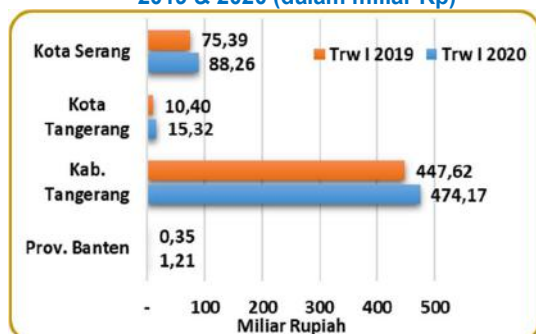
## 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP adalah salah satu komponen anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai bagian dari pendapatan/penerimaan negara.

### a) Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

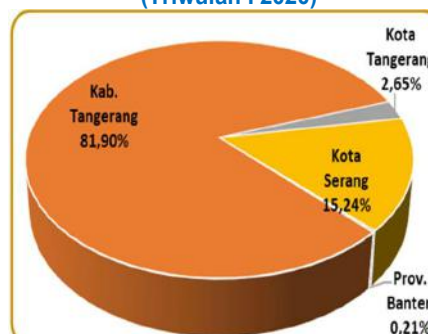
Relisasi pendapatan jasa pelayanan pendidikan triwulan I 2020 di Provinsi Banten telah tercapai sebesar Rp578,95 miliar atau tumbuh 8,47 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

**Grafik 2.5. Realisasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Prov. Banten Triwulan I 2019 & 2020 (dalam miliar Rp)**



Sumber : LKPK/GFS (diolah)

**Grafik.2.6. Kotribusi PNBP Pendapatan Jasa Pendidikan Per-Daerah (Triwulan I 2020)**



Sumber : LKPK/GFS (diolah)

Sebanyak 81,90 persen PNBP jenis ini, dipungut oleh Universitas Terbuka (UT). Tingginya penerimaan PNBP Universitas Terbuka diperoleh dari uang iuran perkuliahan para mahasiswa UT yang tersebar diseluruh Indonesia.

### b) Pendapatan Jasa Kepelabuhanan

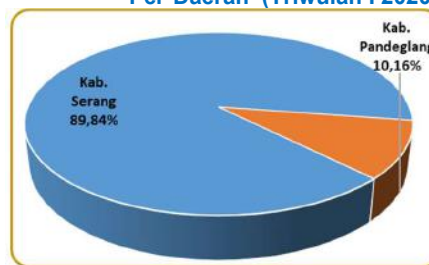
Penerimaan PNBP Pendapatan Jasa Kepelabuhanan triwulan I 2020 di Provinsi Banten sebesar Rp36,65 miliar atau tumbuh 3,93 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

**Grafik 2.7. Realisasi Pendapatan Jasa Kepelabuhanan Prov. Banten Triwulan I 2019 & 2020 (dalam miliar Rp)**



Sumber : LKPK/GFS (diolah)

**Grafik.2.8. Kotribusi PNBP Pendapatan Jasa Kepelabuhanan Per-Daerah (Triwulan I 2020)**



Sumber : LKPK/GFS (diolah)

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) pada bulan Maret 2020 menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan. Pendapatan dari BLU mengalami pertumbuhan sebesar 37,17% dibanding periode yang sama tahun 2019. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-yang-bikin-realisasi-pnbp-lainnya-turun>

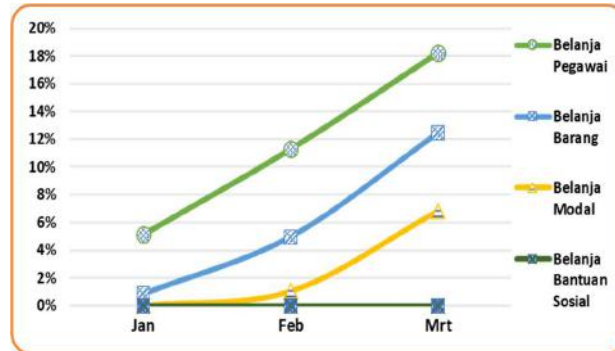
## B. Belanja Negara

Belanja Negara merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk melakukan stimulus fiskal. Salah satu yang populer pada saat krisis ekonomi adalah instrumen ekonomi berupa stimulus fiskal. Secara garis besar, komposisi dari stimulus fiskal adalah berupa tambahan belanja pemerintah (*increased spending*) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan untuk membantu sektor riil.

### 1. Belanja Pemerintah Pusat

Penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat triwulan I 2020 mencapai Rp1,48 triliun atau 13,13 persen dari total pagu anggaran Rp11,27 triliun. Penyerapan anggaran tersebut, dibawah target penyerapan nasional sebesar 15 persen, tetapi lebih baik dari periode yang sama tahun 2019, meningkat 6,73 persen. Realisasi berdasarkan jenis belanja adalah belanja pegawai sebesar Rp709,47 miliar (18,25 persen) diikuti oleh belanja barang sebesar Rp593,93 miliar (14,41 persen), dan belanja modal sebesar Rp176,91 miliar (6,82 persen), sedangkan belanja sosial belum ada realisasi.

**Grafik 2.9. Tren Realisasi Belanja Pegawai, Barang, Modal, dan Bantuan Sosial Lingkup Provinsi**

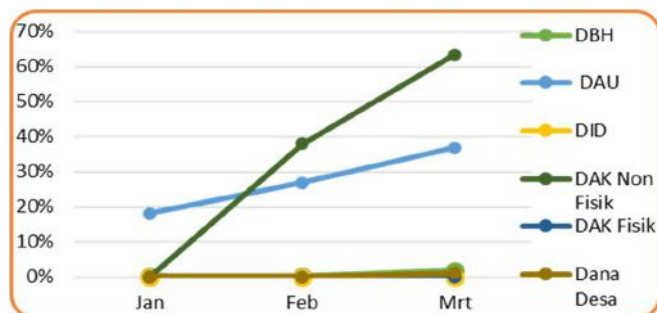


Sumber: LKPK/GFS, OMSPAN (diolah)

### 2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa. Jumlah TKDD yang dianggarkan dalam APBN 2020 untuk Pemda lingkup Provinsi Banten sebesar Rp12,95 triliun, sampai dengan triwulan I 2020 telah disalurkan sebesar Rp3,99 triliun atau 30,87 persen. Secara persentase penyaluran tertinggi dilakukan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 46,23 persen, disusul Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 36,75 persen.

**Grafik 2.10. Tren Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa Lingkup Provinsi Banten Triwulan I 2020**



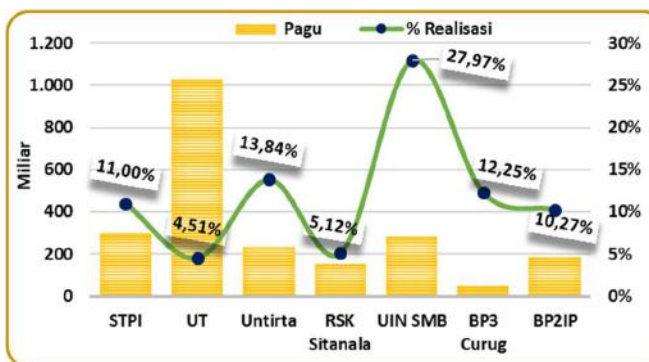
Sumber: OMSPAN & Simtrada (diolah)

### 3. Pengelolaan BLU

Pada Provinsi Banten terdapat 7 satker BLU, yaitu Universitas Terbuka, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, RS Kusta Sitanala, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI), Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Mauk Tangerang, serta Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug.

Dari grafik 2.11 terlihat Universitas Terbuka merupakan BLU yang memiliki pagu belanja tertinggi sebesar Rp1,03 triliun atau 46,05 persen dari pagu seluruh BLU di Banten. Penyerapan tertinggi secara nominal maupun persentase ada pada UIN SMB sebesar Rp79,39 miliar atau 12,47 persen, sedangkan terendah

**Grafik 2.11. Pagu dan realisasi Belanja BLU Triwulan I 2020 di Prov. Banten (dalam miliar rupiah)**



Sumber : OMSPAN (diolah)

secara nominal adalah BP3 Curug sebesar Rp5,97 miliar sedangkan secara prosentase ada pada UT sebesar 5,99 persen.

### 4. Manajemen Investasi Pusat

Realisasi akad penyaluran KUR dan UMi di Propinsi Banten sampai dengan triwulan I 2020 sebesar Rp852,43 miliar meningkat Rp82,02 miliar atau naik 10,65 persen dibandingkan triwulan I 2019, yang tersebar pada 25.195 debitur. Sebanyak 58,50 persen diserap oleh 3 (tiga) daerah yaitu : Kota Tangerang, Kab. Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

**Tabel 2.2. Realisasi Penyaluran KUR Triwulan I 2019 dan 2020 di Banten**

No	Kabupaten/Kota	Trw I 2019		Trw I 2020	
		Akad	Debitur	Akad	Debitur
1	3600 - Banten	435.000.000	15	285.000.000	4
2	3601 - Kab. Pandeglang	61.390.022.000	2.455	86.989.754.741	3.519
3	3602 - Kab. Lebak	71.357.984.353	3.001	90.640.412.604	4.526
4	3603 - Kab. Tangerang	154.471.554.041	4.069	169.593.058.080	4.918
5	3604 - Kab. Serang	74.105.698.200	2.408	85.330.779.004	2.951
6	3671 - Kota Tangerang	173.354.575.000	4.126	170.377.041.900	3.742
7	3672 - Kota Cilegon	54.895.245.000	1.367	62.960.500.000	1.692
8	3673 - Kota Serang	57.518.590.800	1.620	67.650.629.691	1.699
9	3674 - Kota Tangerang Selatan	122.882.877.807	2.607	118.599.890.982	2.144
<b>JUMLAH</b>		<b>770.411.547.201</b>	<b>21.668</b>	<b>852.427.067.002</b>	<b>25.195</b>

Sumber : SIKP (diakses 5 Mei 2020)

### C. Prognosis Realisasi APBN

Berdasarkan *trend analysis* atas data periode Januari s/d Maret 2020, dengan mempertimbangkan bahwa pada triwulan II 2020 terdapat kegiatan keagamaan umat Islam antara lain Bulan Ramadhan (Puasa) dan Idul Fitri 2020 yang disertai dengan pemberian tunjangan hari raya kepada aparatur negara dan non aparatur negara, pencairan DAK Fisik tahap I 2020 dan Dana Desa tahap II 2020 maka diperkirakan pendapatan dan belanja negara akan lebih meningkat dibandingkan triwulan I 2020. Perkiraan pendapatan negara, belanja negara dan surplus/defisit sampai dengan triwulan II 2020 di wilayah Provinsi Banten adalah :

**Tabel 2.3. Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Banten s.d. Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)**

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Trw I		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan II	
		Rp	persen Realisasi Terhadap Pagu	Rp	persen Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Negara	57.694,70	11.151,01	22,76%	24.407,14	49,81%
Belanja Negara	26.489,19	5.477,66	22,61%	10.869,55	44,87%
Surplus/Defisit	31.205,50	5.673,35	22,90%	13.537,59	54,64%

## BAB III

### PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Pagu APBD Pemerintah Daerah Banten Triwulan I Tahun 2020 sebesar Rp38,18 triliun atau meningkat 6,42 persen dibandingkan dengan Pagu APBD periode yang sama tahun lalu.

**Tabel 3.1. Pagu Realisasi APBD Lingkup Provinsi Banten  
s.d. Triwulan I Tahun 2019 - 2020 (dalam miliar rupiah)**

URAIAN	TRIWULAN I 2019		TRIWULAN I 2020	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>	<b>35,875.87</b>	<b>6,856.62</b>	<b>38,177.95</b>	<b>6,536.60</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>15,405.72</b>	<b>2,906.82</b>	<b>17,638.16</b>	<b>3,148.40</b>
Pendapatan Pajak Daerah	12,856.78	2,616.45	14,875.35	2,713.92
Pendapatan Retribusi Daerah	379.43	67.36	443.40	80.16
Pendapatan Hasil Pengelolaan Lain-lain PAD yang sah	182.21 1,987.29	0.49 222.52	182.29 2,137.12	- 354.32
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>19,390.36</b>	<b>3,945.35</b>	<b>19,464.02</b>	<b>3,385.36</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perir</b>	<b>15,828.01</b>	<b>3,605.78</b>	<b>15,222.04</b>	<b>3,077.02</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	1,858.87	518.14	1,318.05	20.57
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	28.18	4.63	19.98	3.69
Dana Alokasi Umum	8,681.33	2,638.62	8,807.94	2,709.72
Dana Alokasi Khusus	5,259.63	444.39	5,076.06	343.04
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-	-
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>1,267.01</b>	<b>249.76</b>	<b>1,567.29</b>	<b>-</b>
Dana Otonomi Khusus	26.07	-	-	-
Dana Penyesuaian	1,240.94	249.76	1,567.29	-
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>2,295.34</b>	<b>76.35</b>	<b>2,549.70</b>	<b>308.34</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	2,295.34	76.35	2,549.70	308.34
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>13.45</b>	<b>125.00</b>	<b>-</b>
Bantuan Keu dari Pemda Prov. Lainnya	-	13.45	125.00	-
Bantuan Keu dari Pemda Kabupaten	-	-	-	-
Bantuan Keu dari Pemda Kota	-	-	-	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>1,079.79</b>	<b>4.45</b>	<b>1,075.77</b>	<b>2.84</b>
Pendapatan Hibah	1,079.79	4.33	1,075.77	2.83
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	0.13	-	0.01
<b>BELANJA</b>	<b>33,795.42</b>	<b>3,903.91</b>	<b>35,581.08</b>	<b>4,143.48</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>26,266.54</b>	<b>3,516.65</b>	<b>27,922.35</b>	<b>3,787.08</b>
Belanja Pegawai	12,406.21	1,986.68	12,179.39	2,112.04
Belanja Barang	10,932.20	1,091.70	12,418.50	1,387.80
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	2,746.43	437.73	3,180.02	283.34
Belanja Bantuan Sosial	167.42	0.54	144.43	3.90
Belanja Bantuan Keuangan	14.28	-	-	-
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7,435.31</b>	<b>384.69</b>	<b>7,380.67</b>	<b>314.07</b>
Belanja Tanah	1,281.23	212.52	1,376.40	101.95
Belanja Perlatan dan Mesin	1,024.85	25.78	953.65	30.86
Belanja Gedung dan Bangunan	2,140.49	37.59	2,841.87	83.78
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,713.74	107.68	2,070.58	96.99
Belanja Aset Tetap Lainnya	136.00	0.77	86.85	0.42
Belanja Aset Lainnya	139.00	0.36	51.31	0.07
Belanja Modal Dana BOS	-	-	-	-
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>93.57</b>	<b>2.57</b>	<b>278.07</b>	<b>42.33</b>
Belanja Tidak Terduga	93.57	2.57	278.07	42.33
<b>TRANSFER PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>4,835.29</b>	<b>150.04</b>	<b>5,257.04</b>	<b>415.92</b>
Transfer Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/K	2,733.79	85.69	3,083.37	386.29
Transfer Bantuan Keu Kepada Prov/Kab	2,100.65	64.35	1,890.91	29.63
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.85	-	282.77	-
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(2,754.83)</b>	<b>2,802.67</b>	<b>(2,660.17)</b>	<b>1,977.20</b>

Sumber : Pemda wilayah Banten, DJPK data diolah



Realisasi APBD Pemerintah Daerah di Banten periode triwulan I tahun 2020 sebesar Rp6,54 triliun atau 17,12 persen dari total pagu. Dibandingkan periode yang sama tahun 2019, realisasi APBD mengalami penurunan sebesar 4,67 persen, Porsi realisasi pendapatan Provinsi Banten untuk membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 48,17 persen, Dana Transfer sebesar 51,79 persen dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 0,26 persen.

## A. PENDAPATAN DAERAH

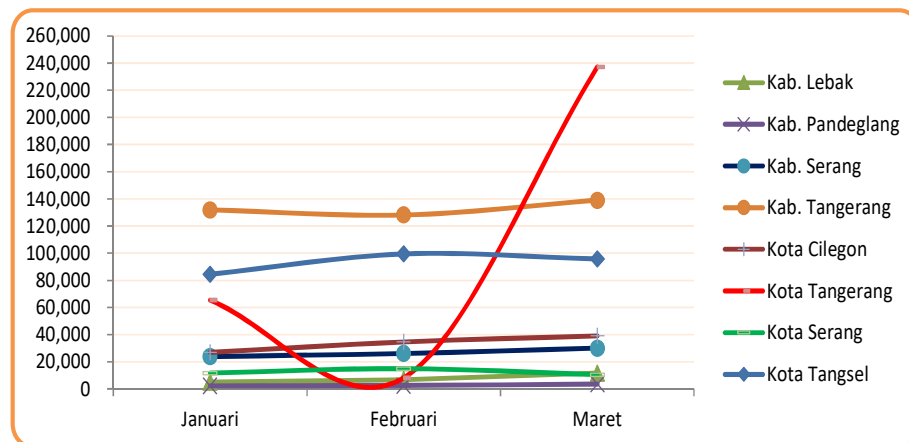
### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi penerimaan PAD di Banten secara agregat s.d triwulan I 2020 sebesar Rp3,15 triliun atau 17,85 persen dari target. Capaian nominal realisasi PAD triwulan I 2020 meningkat 8,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Hal ini dikarenakan capaian realisasi pajak tahun 2020 meningkat sebesar 3,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

#### a) Penerimaan Pajak Daerah

Realisasi penerimaan pajak daerah di wilayah Banten triwulan I 2020 sebesar Rp2,71 triliun atau 18,24 persen dari target. Capaian nominal realisasi pajak triwulan I tahun 2020 sebesar Rp2,71 triliun atau meningkat sebesar 3,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

**Grafik 3.1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Banten Triwulan I Tahun 2020 (dalam juta rupiah)**



Sumber : Pemda wilayah Banten, DJPK data diolah

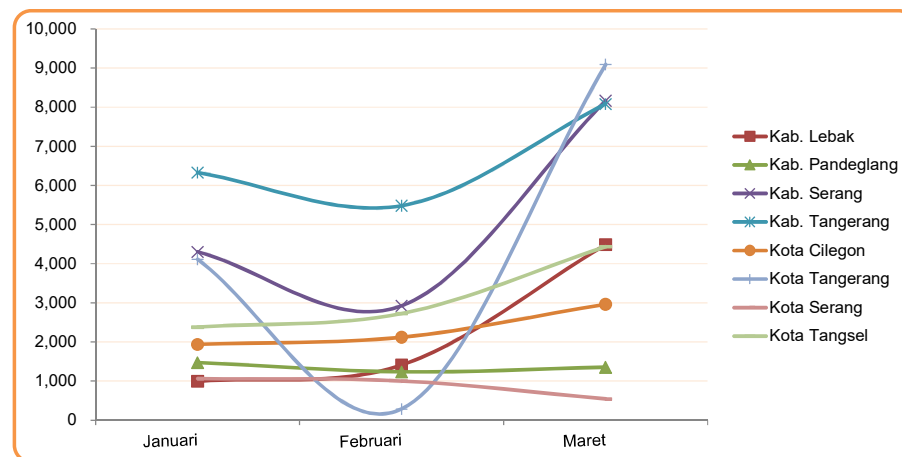
Realisasi pajak daerah terbesar berasal dari Pemda Provinsi Banten sebesar Rp1.475 miliar, diikuti Kab. Tangerang sebesar Rp399,04 miliar, Kota Tangerang sebesar Rp310,58 miliar dan Kota Tangerang Selatan Rp279,59 miliar. Sumber tertinggi pajak daerah Kab. Tangerang adalah

Pajak BPHTB dan Pajak Restoran. Kab. Pandeglang merupakan daerah dengan realisasi pajak terendah sebesar Rp8,51 miliar, penyebabnya antara lain penerimaan Pajak PBB merupakan penerimaan pajak terbesar di Kab. Pandeglang namun baru terealisasi 0,03 persen dari total pagu.

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Realisasi penerimaan retribusi daerah di wilayah Banten s.d triwulan I 2020 sebesar Rp80,16 miliar atau 18,08 persen dari target. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, nilai nominal realisasi Triwulan I Tahun 2020 meningkat 19 persen.

**Grafik 3.2. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Banten Triwulan I Tahun 2020 (dalam juta rupiah)**



Sumber : Pemda wilayah Banten, DJPK data diolah

Realisasi nominal tertinggi adalah Kab. Tangerang sebesar Rp19,90 miliar atau 24,82 persen dari total realisasi penerimaan retribusi di Banten, yang didominasi dari penerimaan Retribusi IMB sebesar Rp10,77 miliar. Kota Serang merupakan daerah dengan realisasi penerimaan retribusi terendah yaitu Rp2,61 miliar atau 3,26 persen dari total penerimaan realisasi di Banten.

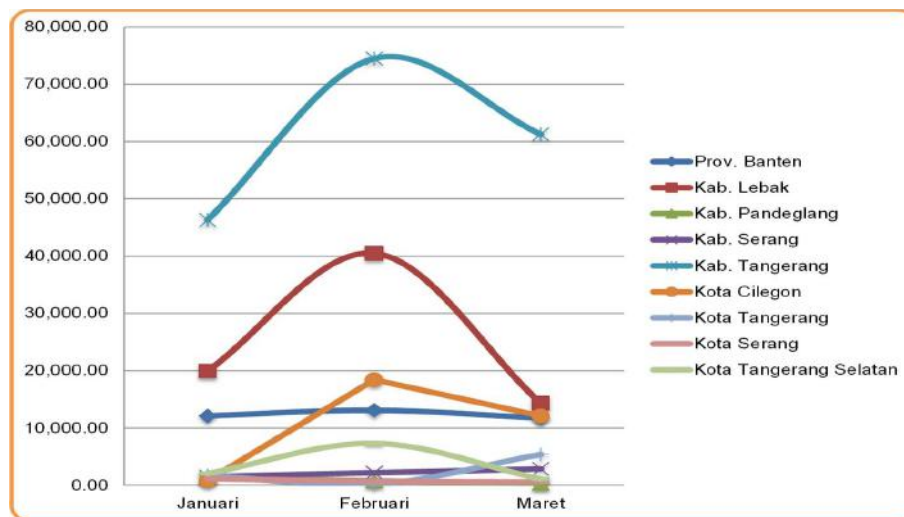
c) Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi Penerimaan lain-lain PAD yang Sah s.d. triwulan I 2020 sebesar Rp354,32 miliar atau 16,58% dari target. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, nilai nominal realisasi ini meningkat 59,23 persen.

Realisasi nominal tertinggi adalah Kab. Tangerang sebesar Rp182,06 miliar atau 33,18 persen dari total realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang

Sah, sedangkan Kota Serang merupakan daerah dengan realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah terendah yaitu Rp2,40 miliar atau 3,93

**Grafik 3.3. Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Banten Triwulan I Tahun 2020 (dalam juta rupiah)**



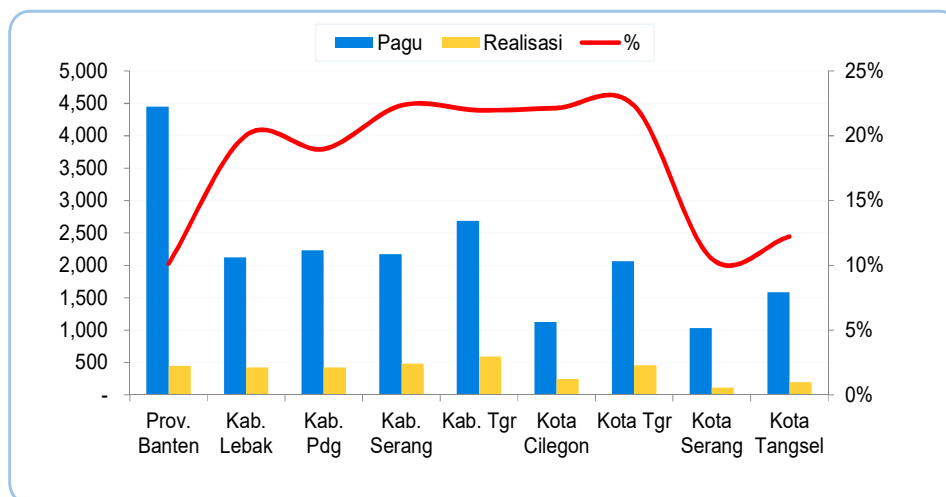
Sumber : Pemda wilayah Banten, DJPK data diolah

persen dari total penerimaan realisasi di Banten.

## 2. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer sampai dengan triwulan I 2020 mencapai Rp3,39 triliun atau 17,39 persen dari target. Dibandingkan periode yang sama tahun 2019 nominal pendapatan transfer menurun sebesar 14,19 persen.

**Grafik 3.7. Realisasi Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Banten Triwulan I Tahun 2020 (dalam miliar rupiah dan persen)**



Sumber : Pemda wilayah Banten, DJPK data diolah

Porsi Pendapatan transfer terbesar dari Dana Perimbangan yaitu 90,89 persen dari total pendapatan transfer. Dana Perimbangan terdiri dari DBH (0,79 persen), DAU (88,06 persen), DAK (11,15 persen). Realisasi nominal pendapatan transfer tertinggi yaitu Kabupaten Tangerang Rp590,20 miliar dan terendah Kota Serang sebesar Rp108,60 miliar.

### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

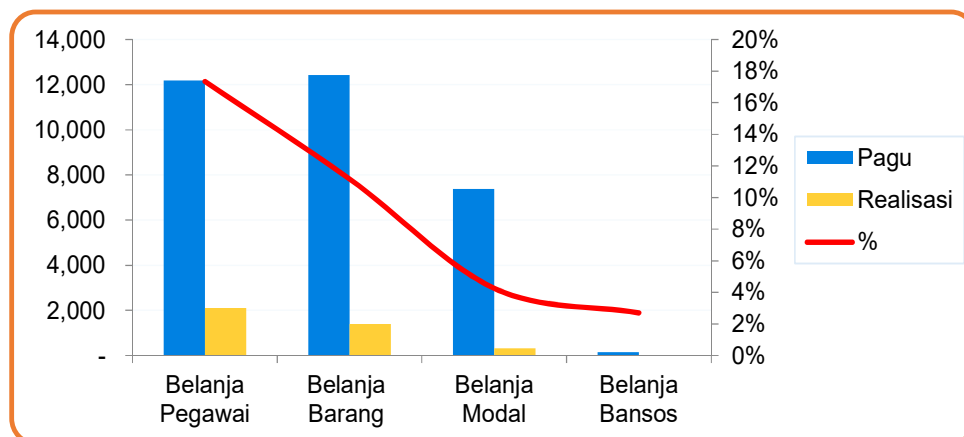
Total realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lingkup Provinsi Banten s.d. triwulan I Tahun 2020 sebesar Rp2,84 miliar. Realisasi pendapatan tersebut terdapat pada Provinsi Banten sebesar 56,52 persen dan Kabupaten Lebak sebesar 43,48 persen. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, nilai nominal realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menurun 0,36 persen.

## B. Belanja Daerah

### 1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bansos

Penyerapan belanja di wilayah Provinsi Banten s.d triwulan I 2020 secara agregat masih rendah sebesar 11,88 persen. Penyerapan tertinggi belanja pegawai, diikuti belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja bansos. Penyerapan belanja tertinggi adalah Kota Tangerang (13,27 persen) sedangkan penyerapan terendah adalah Provinsi Banten (10,29 persen). Hal ini dapat mengakibatkan program infrastruktur dan *multiplier effect* pada perekonomian berjalan lambat.

Grafik 3.8. Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Barang, Modal dan Bansos Lingkup Provinsi Banten s.d. Triwulan I Tahun 2020 (dalam miliar dan persen)

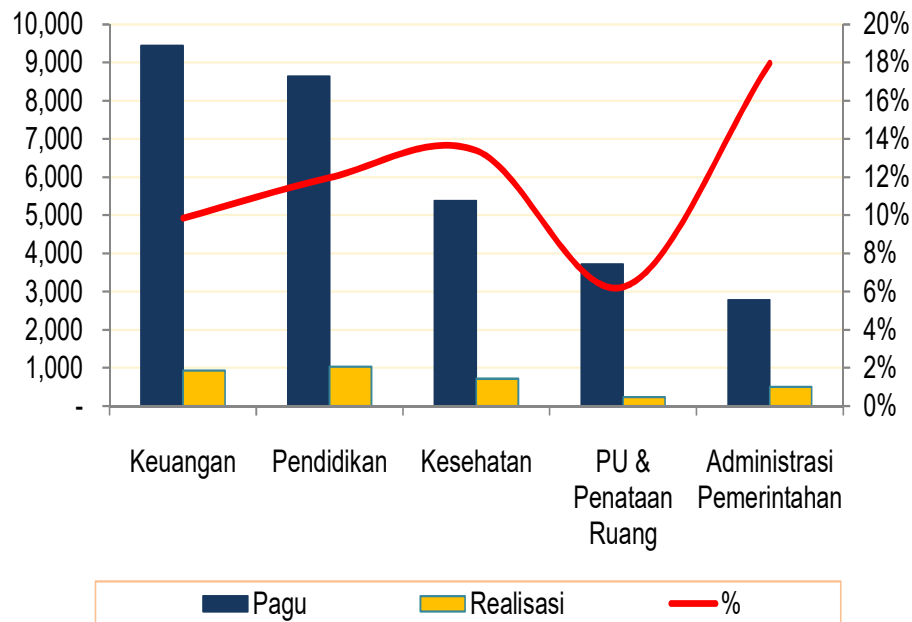


Sumber : Pemda wilayah Banten, DJPK data diolah

## 2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Berdasarkan urusan dalam wilayah Provinsi Banten Triwulan I Tahun 2020 terdapat lima besar urusan dengan alokasi pagu tertinggi, dengan persentase penyerapan masing-masing yaitu Keuangan (23,47 persen), Pendidikan (21,50 persen), Kesehatan (13,38 persen), Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (9,23 persen) dan Administrasi Pemerintahan (6,91 persen).

**Grafik 3.9. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Lingkup Prov. Banten s.d. triwulan I Tahun 2020 (dalam miliar dan persen)**



Sumber : Pemda wilayah Banten, DJPK data diolah

Dibandingkan periode yang sama tahun 2019, belanja klasifikasi urusan yang meningkat adalah urusan Keuangan (0,12 persen), Kesehatan (0,42 persen), dan Administrasi Pemerintahan (1,70 persen), sedangkan belanja urusan yang menurun adalah Pendidikan (0,65 persen dan PU dan Penataan Ruang (2,02 persen).

### B. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020

Dengan menggunakan tren 2014-2019, maka dapat diperoleh rata-rata kenaikan pendapatan (8,4 persen) dan belanja (11,7 persen). Prognosa yang dihasilkan terjadi kenaikan yang relatif tidak terlalu besar pada pendapatan dan belanja pada akhir Tahun 2020.

Tabel 3.2. Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Banten

Uraian	Pagu	TWI 2020		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV 2020	
		Realisasi	%	Rp	% Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Daerah	35,875.87	6,856.62	19%	39,115.87	109%
Belanja Daerah	38,994.40	4,053.95	10%	41,239.32	106%
Surplus/Defisit	-3,118.53	2,802.67	-90%	-2,123.45	68%

Sumber : Pemda wilayah Banten, DJPK data diolah



## BAB IV

### PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

#### A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasi

Pendapatan negara konsolidasi triwulan I 2020 sebesar Rp14,06 triliun, naik 5,32 persen sedangkan Belanja Negara konsolidasian sebesar Rp6,41 triliun, naik 17,72 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

**Tabel 4.1. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Banten Triwulan I Tahun 2020 (miliar rupiah)**

Uraian	2020					2019
	Pusat	Daerah	Eliminasi	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
<b>Pendapatan Negara</b>	<b>11,151.01</b>	<b>6,150.29</b>	<b>3,245.51</b>	<b>14,055.80</b>	<b>5.32</b>	<b>13,346.03</b>
Pendapatan Perpajakan	10,386.98	2,713.92	-	13,100.90	6.85	12,261.01
Pendapatan Bukan Pajak	764.03	356.73	168.70	952.07	(11.57)	1,076.58
Hibah	-	2.83	-	2.83	(64.80)	8.04
Transfer	-	3,076.81	3,076.81	-	(100.00)	0.40
<b>Belanja Negara</b>	<b>5,477.66</b>	<b>4,173.10</b>	<b>3,245.51</b>	<b>6,405.26</b>	<b>17.72</b>	<b>5,440.90</b>
Belanja Pemerintah	1,480.31	4,143.47	-	5,623.79	6.29	5,290.93
Belanja Pegawai	709.47	2,112.04	-	2,821.51	6.14	2,658.30
Belanja Barang	593.93	1,387.80	-	1,981.73	15.64	1,713.77
Belanja Modal	176.91	314.06	-	490.98	2.77	477.76
Hibah	-	283.34	-	283.34	(35.27)	437.73
Bantuan Sosial	-	3.90	-	3.90	387.50	0.80
Belanja Lain-lain	-	42.33	-	42.33	1,547.08	2.57
Transfer	3,997.35	29.63	3,245.51	781.47	421.08	149.97
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>5,673.35</b>	<b>1,977.19</b>	<b>-</b>	<b>7,650.54</b>	<b>(3.22)</b>	<b>7,905.13</b>
<b>Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>1,404.61</b>	<b>-</b>	<b>1,404.61</b>	<b>53.02</b>	<b>917.94</b>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	1,406.11	-	1,406.11	49.12	942.94
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	1.50	-	1.50	(94.00)	25.00
<b>Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran</b>	<b>5,673.35</b>	<b>3,381.80</b>	<b>-</b>	<b>9,055.15</b>	<b>2.63</b>	<b>8,823.07</b>

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Banten (diolah)

Walaupun pendapatan negara triwulan I tahun 2020 mengalami peningkatan akan tetapi belanja negara juga mengalami peningkatan, bahkan peningkatannya lebih besar dibandingkan pendapatan namun masih surplus pada triwulan I tahun 2020 sebesar Rp7.65 triliun. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran triwulan I 2020 naik sebesar 2,63 persen dibanding periode yang sama tahun 2019.

#### B. Pendapatan Konsolidasian

##### 1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pendapatan pemerintah konsolidasian terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBPN, hibah dan transfer dana bantuan ke desa. Total pendapatan konsolidasian pemerintah pusat dan pemerintah daerah triwulan I tahun 2020 adalah sebesar Rp14,06 triliun. Pendapatan tersebut 64,45 persen merupakan pendapatan Pemerintah Pusat dan 35,55 persennya adalah pendapatan Pemerintah Daerah. Pendapatan Pemerintah Pusat tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada Pemerintah Daerah berupa dana transfer maupun belanja pemerintah pusat di daerah berupa belanja Dekon/TP/UB.

Pendapatan konsolidasian triwulan I tahun 2020 didominasi oleh pendapatan perpajakan sebesar 93,21 persen, sedang proporsi pendapatan bukan pajak dan hibah hanya sebesar 6,77 persen dan 0,02 persen dari total pendapatan konsolidasian.

**Gambar 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Banten Triwulan I Tahun 2019 dan Tahun 2020**



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Banten

hibah hanya sebesar 6,77 persen dan 0,02 persen dari total pendapatan konsolidasian. Penerimaan perpajakan konsolidasian triwulan I tahun 2020 meningkat dibanding triwulan I 2019, naik sebesar Rp839,89 miliar (6,85 persen). Peningkatan kinerja penerimaan

pajak disebabkan peningkatan pendapatan pajak pemerintah pusat, sementara pendapatan pajak pemerintah daerah mengalami penurunan jika dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk realisasi PNPB konsolidasian triwulan I tahun 2020 terjadi penurunan dibanding periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp124,51 miliar atau turun 11,57 persen.

Penerimaan terbesar pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah masing-masing diperoleh dari pendapatan perpajakan sebesar Rp10,39 triliun dan transfer sebesar Rp3,08 triliun. Pendapatan transfer masih mendominasi pendapatan pemda yang menunjukkan ketidakmadirian/ ketergantungan pemda terhadap pemerintah pusat. Untuk mengurangi ketergantungan, Pemda diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan baik penerimaan perpajakan maupun PNPB.

**Gambar 4.2 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Banten Triwulan I Tahun 2020**



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Banten (diolah)

**Gambar 4.3. Perbandingan Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Banten Triwulan I 2019 dan 2020**



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Banten

## 2. Analisis Perubahan

Pada tabel 4.1. Pendapatan negara konsolidasian triwulan I 2020 mengalami peningkatan (5,32 persen). Peningkatan ini ditopang oleh pajak perdagangan internasional yang

mengalami peningkatan 308,44 miliar atau 0,96 persen sedangkan penerimaan dalam negeri mengalami penurunan 5,05 persen.

### 3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

PDRB Provinsi Banten (ADHK) triwulan I 2020 mencapai Rp114,34 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,09 persen. Pada triwulan I 2020 terdapat peningkatan realisasi penerimaan perpajakan sebesar 6,85 persen dibanding periode yang sama tahun 2019, namun tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pada triwulan I 2019 pertumbuhan ekonomi tumbuh dari 5,45 persen terkoreksi menjadi 3,09 persen periode yang sama tahun 2020. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) triwulan I turun 11,57 persen.

**Tabel 4.2. Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2019 dan 2020**

Uraian	Realisasi		Kenaikan
	2019	2020	
Penerimaan Perpajakan	12,261.01	13,100.90	6.85%
PNBP	1,076.58	952.06	-11.57%
Total	13,337.59	14,052.96	5.36%
PRDRB/Pert.Ekonomi Tw I	110,909,770,231,302	114,339,517,516,891	3.09%

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Banten dan BPS Prov Banten (diolah)



## C. BELANJA KONSOLIDASIAN

### 1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Belanja Konsolidasian Banten didominasi oleh Belanja Operasional sebesar Rp5.132,81 miliar atau 91,27 persen, sedangkan belanja modal hanya sebesar Rp490,97 miliar atau 8,73 persen dari total belanja konsolidasian. Hal ini menunjukkan bahwa pada triwulan pertama terdapat banyak kegiatan/ proyek yang masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Dilihat dari porsinya Belanja Pemerintah Pusat lebih besar

**Gambar 4.4. Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Banten Tahun 2020**



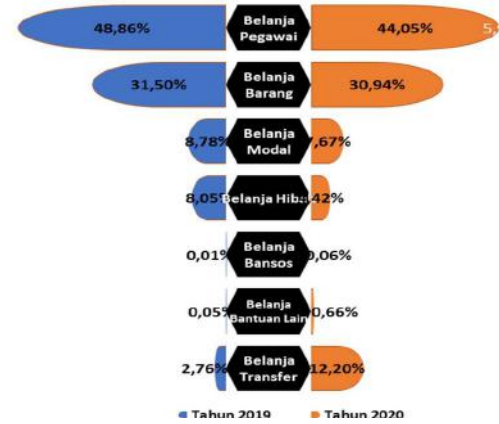
Sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Banten (diolah)

dibanding porsi Belanja Pemerintah Daerah terutama untuk belanja Transfer Pempus sebesar Rp3,99 triliun (99,26 persen) , dan Pemda sebesar Rp29,63 miliar (0,74 persen) dari belanja transfer konsolidasian. Hal ini mencerminkan pemda dalam pembiayaan pemerintahannya masih mengandalkan dana transfer. Belanja pegawai masih mendominasi belanja pemerintah daerah, yang mengindikasi bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah masih bertumpu pada pengeluaran belanja pegawai, meski pertumbuhan ekonomi tumbuh melambat 3,09 persen (yoy), dan 3,01 persen (q to q).

**2. Analisis Perubahan**

Realisasi belanja konsolidasian s.d. triwulan I tahun 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp964,36 miliar (17,72 persen). Komponen belanja pemerintah penyumbang kenaikan belanja konsolidasian triwulan I 2019 adalah belanja lain-lain/tak terduga (1.547,08 persen) dan belanja bantuan sosial (387,75 persen) diduga karena pengaruh wabah pandemi covid 19. Komposisi belanja konsolidasian triwulan I 2019 maupun triwulan I 2020 masih didominasi belanja pegawai dan belanja barang (grafik 4.5).

**Gambar 4.5 Perbandingan Realisasi Belanja Konsolidasian Provinsi Banten Tahun 2019-2020 (Miliar Rupiah)**



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Banten

**3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional**

Kebijakan fiskal Pemerintah Banten tertuang dalam alokasi anggaran 2020 dimaksudkan untuk mempengaruhi perekonomian makro yang ditunjukkan pada pertumbuhan PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Kemiskinan.

**Tabel 4.3. Ratio Indikator Ekonomi Makro Provinsi Banten Tahun 2020**

Uraian	2019	2020	Ratio Perbandingan	Keterangan
Belanja	5,440.90	6,405.25	17.72%	dalam miliar rupiah
PDRB Triwulan I	110,909.77	114,339.52	3.09%	dalam miliar rupiah
IPM	72.44	72.44*	0.00%	IPM menggunakan data 2019
Kemiskinan	4.94	4.94*	0.00%	data angka kemiskinan September 2019

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Banten dan BPS (diolah)

Belanja Pemerintah triwulan I tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 17,72 persen dibanding dengan periode yang sama tahun 2019. Kenaikan Belanja pemerintah telah mendorong perekonomian Banten secara agregat, hal ini terlihat dari kenaikan PDRB ADHB maupun ADHK Provinsi Banten pada triwulan I 2020, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,09 persen.

#### D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

PDRB Provinsi Banten pada triwulan I 2020 (ADHB) Rp.165,67 triliun. Dilihat dari Laporan Operasional GFS konsumsi pemerintah (G) sebesar Rp5,91 triliun, sedangkan nilai investasi pemerintah dicerminkan dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto atau Nilai Transaksi Aset Non Keuangan Netto pada LO yaitu sebesar Rp0,49 triliun.

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diperhitungkan kontribusi Pemerintah terhadap PDRB, terutama belanja Pemerintah (G) dan Investasi (I) seperti dalam tabel berikut :

**Tabel 4.4. Ringkasan Laporan Operasional Provinsi Banten Triwulan I Tahun 2020**

Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto		
<b>Pendapatan:</b>		<b>19,533,464,084,357</b>
a.	Pajak	13,100,612,709,356
b.	Kontribusi Sosial	-
c.	Hibah	2,832,420,243
d.	Pendapatan lain	6,430,018,954,758
<b>Beban:</b>		<b>5,914,276,097,285</b>
a.	Kompensasi pegawai	2,853,005,699,128
b.	Penggunaan barang dan jasa	1,947,373,548,798
c.	Konsumsi aset tetap	0
d.	Bunga	0
e.	Subsidi	0
f.	Hibah	1,064,808,714,463
g.	Manfaat sosial	3,901,552,211
h.	Beban lainnya	45,186,582,685
<b>Keseimbangan operasi bruto/neto</b>		<b>13,711,074,124,946</b>
<b>Transaksi Aset Non Keuangan Neto</b>		<b>490,978,596,744</b>
a.	Aset tetap	395,959,551,526
b.	Persediaan	0
c.	Barang berharga	0
d.	Aset nonproduksi	95,019,045,218
Net Lending/Borrowing		13,128,209,390,327
<b>Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban</b>		<b>13,128,209,390,327</b>
a.	Akuisisi Neto Aset Keuangan	13,128,209,390,327
	-Domestik	13,128,209,390,327
	-Luar Negeri	-
b.	Keterjadian Kewajiban	-
	-Domestik	-
	-Luar Negeri	0

Sumber: LO LSKP Kanwil DJPb Prov.Banten (diolah)

**Tabel 4.5. Kontribusi Belanja Pemerintah dan Investasi Terhadap PDRB Triwulan I 2020**

Uraian	Nilai	Kontribusi terhadap PDRB
Belanja Pemerintah (G)	5,914,276,097,285	3.57%
PMTB/Investasi (I)	490,978,596,744	0.30%
PDRB sampai dengan Tw I 2019 (ADHB)	165,669,046,319,678	

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov.Banten & BPS

Meskipun kontribusi belanja dan investasi pemerintah relatif kecil tetapi pengeluaran tersebut menjadi *trigger* dan memiliki *multiplier effect* bagi komponen pembentuk PDRB. Dilihat dari data BPS, apabila dicermati PDRB triwulan I 2020 yang tumbuh melambat 3,09 persen secara struktur pemilik peranan terbesar adalah Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi Swasta dengan proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (53,99 persen) dan PMTB (32,67 persen).

### Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Banten

Virus corona atau saat ini dikenal dengan nama Covid-19, pertama kali muncul di Wuhan salah satu kota di China, yang kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Saat ini terdapat 212 negara dan wilayah di seluruh dunia yang telah melaporkan Covid-19<sup>1</sup>. Di Indonesia tercatat ada 4.557 kasus tersebar di 34 provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Banten dengan jumlah total pasien positif sebanyak 490 kasus<sup>2</sup>. Semenjak Covid-19 merambah di Banten, Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan membatasi ruang gerak masyarakat, meliburkan sekolah, menutup tempat keramaian, merumahkan aparatur sipil negara dan lain-lain. Dampak dari penyebaran covid-19 menimbulkan efek negatif bagi perekonomian Banten.

Kepala Perwakilan BI Banten Erwin Soeridimadja mengatakan pertumbuhan ekonomi di Banten pada 2020 diperkirakan mencapai 5,4-5,8 persen. Namun, dengan isu penyebaran Corona perlu ada kalkulasi ulang khususnya dampak secara domestik. Dimungkinkan ada penurunan angka proyeksi ekspektasi konsumsi karena penyebaran virus ini, diperkirakan ada penundaan investasi dari negara terdampak seperti China, dimana nilai investasi negara ini di Banten mencapai US\$ 0,42 miliar, dampak Corona juga bisa mempengaruhi pada penurunan transportasi dan akomodasi. Sejauh ini, ada penutupan rute penerbangan di Bandara Soetta yang juga berpengaruh ke Banten, Industri elektronik juga dimungkinkan terganggu akibat corona khususnya yang mendapatkan bahan baku dari China. Namun di samping itu, ada juga industri yang justru dimungkinkan mendapat keuntungan seperti industri alas kaki. Ini terjadi karena ada peralihan pesanan dari China ke Indonesia.<sup>3</sup>

Dampak pandemi Covid-19 terlihat jelas setelah Badan Pusat Statistik Provinsi Banten merilis Ekonomi Banten triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 tumbuh 3,09 persen (y-on-y), melambat dibanding capaian triwulan I-2019 yang sebesar 5,45 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh

<sup>1</sup> <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/12/100200723/update-corona-12-mei--4-25-juta-orang-terinfeksi-1-5-juta-sembuh>

<sup>2</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5010841/tangerang-raya-sumbang-19-pasien-kasus-corona-di-banten-jadi-490-kasus>

<sup>3</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4936207/gambaran-dampak-virus-corona-bagi-perekonomian-banten>



Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,70 persen. Dari sisi Pengeluaran dicapai oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 4,19 persen. Ekonomi Banten triwulan I-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 3,01 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Sementara dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan oleh kontraksi pada hampir seluruh komponen pengeluaran kecuali Konsumsi Rumah Tangga dan Komponen Total Net Ekspor.<sup>4</sup>

Pelambatan pertumbuhan yang terjadi saat ini dimungkinkan akan berlanjut pada triwulan berikutnya, untuk itu diperlukan upaya untuk mengatasi Pandemi Covid-19 ini di Indonesia terutama di Banten. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Beberapa kebijakan fiskal tertuang dalam Perppu tersebut, antara lain :

- 1) Memberikan relaksasi di bidang perpajakan antara lain : penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk. dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.
- 2) Kebijakan di bidang belanja negara antara lain : melakukan pergeseran anggaran dalam APBN, melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran TKDD.
- 3) Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan relaksasi dibidang perpajakan diharapkan dapat membuat dunia usaha mampu menghadapi dampak pandemi ini, sedangkan terkait APBN dan APBD seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Provinsi Banten dapat segera melakukan refocusing belanja dalam wujud kegiatan/pengeluaran dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 dan memberikan bantuan ke masyarakat yang terdampak sehingga daya beli masyarakat tidak turun yang pada akhirnya diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan baik.

<sup>4</sup> Berita Resmi Statistik No.29/05/36/Th.XIV,5 Mei 2020 BPS Provinsi Banten

**Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten**

Jl. K.H. Abdul Fatah Hasan No.33

Serang 42118

Situs: [www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/banten](http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/banten)